

# ANALISIS DAMPAK SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN HILIRISASI RUMPUT LAUT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

*Analysis of the Impact of Synergy Between Central and Regional Planning in Supporting the Development of Downstream Seaweed in the Province of East Nusa Tenggara*

Margaretha Adikawati Serang<sup>1,a)</sup>, Cicilia A. Tungga<sup>2,b)</sup>, Olivia E. Tomasow<sup>3,c)</sup>, Fransina W. Ballo<sup>4,d)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

**Koresponden :** <sup>a)</sup> dikaserang998@gmail.com, <sup>b)</sup> cicilia.tungga@staf.undana.ac.id,

<sup>c)</sup> olivia.tomasowa@staff.undana.ac.id, <sup>d)</sup> wellyballo@gmail.com

## ABSTRAK

Sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023 diperlukan keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2018-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT. Analisis data dilakukan menggunakan analisis triangulasi data untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dampak positif seperti terwujudnya keselarasan arah kebijakan pembangunan, penyelarasan program dan kegiatan lintas tingkat pemerintahan, peningkatan efektivitas anggaran, dan pengembangan hilirisasi rumput laut. Namun masih terdapat keterbatasan integrasi lintas sektor, rendahnya investasi pada sektor hilir, keterbatasan anggaran, serta keterlambatan pelaksanaan program. Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan sinergitas tidak hanya ditentukan oleh keselarasan dokumen perencanaan tetapi juga oleh kapasitas implemementasi dan sumber daya.

**Kata Kunci :** Dampak, Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah, Hilirisasi Rumput Laut

## PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan dengan memiliki panjang garis pantai sebesar 5.934,624739 km menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai penghasil rumput laut terbesar di Indonesia setelah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memiliki luas lahan budidaya seluas 12.150 Ha atau 22,6% dari luas budidaya rumput laut dan dijalankan oleh 64.095 orang dengan daerah sentra utama produksi rumput adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote

Ndao, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur. (Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2023).

Dalam konteks kebijakan nasional hilirisasi diartikan sebagai strategi transformasi struktural ekonomi dari ketergantungan terhadap komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis industri dan inovasi. Rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah belum melalui proses pengolahan lanjutan. Padahal potensi nilai tambah dari komoditas tersebut sangat besar jika dikembangkan melalui industri hilir.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menganalisis dampak sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus penelitian tidak hanya pada aspek teknis produksi, nilai tambah, atau keberlanjutan, tetapi pada dimensi integrasi kebijakan, keselarasan dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, dan Renstra), serta pengaruhnya terhadap kinerja sektor hilir secara lebih komprehensif.

Pada RPJMN 2020-2024 mencantumkan program prioritas nasional antara lain program industri sub sektor prioritas, program pengembangan kawasan industri di luar Jawa, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri. Sedangkan pada RPJMD 2018-2023 memiliki program prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah program NTT Bangkit NTT Sejahtera. Program prioritas nasional dan program prioritas daerah Nusa Tenggara Timur tersebut diimplementasikan ke dalam program prioritas kementerian dan perangkat daerah provinsi yang meliputi program pengelolaan perikanan budidaya, program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), program pengembangan UMKM serta program perencanaan dan pembangunan industri.

Tantangan sinergitas perencanaan tampak dalam pelaksanaan berbagai program pengembangan komoditi rumput laut. Beberapa program pusat seringkali tidak sepenuhnya mengakomodasi kondisi geografis, sosial budaya, dan infrastruktur daerah yang sangat spesifik dan beragam. Sebaliknya, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan, pembiayaan, dan SDM dalam menyusun dan mengimplementasikan perencanaan yang adaptif dan berbasis data. Di sisi lain, mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan seringkali belum berjalan optimal, yang menyebabkan kebijakan hilirisasi berjalan parsial, sektoral, dan terfragmentasi (RPMJD, 2018-2023). Situasi ini memperkuat urgensi untuk melakukan evaluasi secara sistematis terhadap bagaimana sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah telah (atau belum) berdampak pada upaya hilirisasi rumput laut di Nusa Tenggara Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar

waktu, maupun antar fungsi pemerintah antara pusat dan daerah. Indikator sinergitas perencanaan pusat dan daerah diukur melalui keselarasan target makro, dokumen perencanaan, pendanaan, dan integrasi sistem informasi. Penilaian ini memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan searah, seperti yang dievaluasi melalui forum strategis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Penyelarasan ini dilakukan dengan empat dimensi utama yaitu dimensi hirarki (atas-bawah dan bawah-atas) yaitu menyelaraskan dokumen perencanaan pusat (RPJPN/RPJMN dengan RPJPMMD/RPJMNMD). Dimensi pendekatan perencanaan adalah menggabungkan lima pendekatan sistem perencanaan nasional yang terdiri dari pendekatan politik (visi kepala daerah), teknokratik (data dan ilmu pengetahuan), partisipatif (masukan publik), dan koordinasi melalui murenbang dan rakortekbang. Pemerintah pusat menangani urusan lintas daerah berskala nasional sementara daerah mengeksekusi urusan yang menjadi kewenangan absolut mereka dengan tetap mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dimensi sinkronisasi data dan anggaran adalah memastikan kesesuaian target kinerja dengan penganggaran. Hal ini diwujudkan melalui sinkronisasi program pusat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta alokasi pendanaan APBD yang selaras dengan prioritas nasional.

### ***Collaborative Governance***

*Collaborative Governance* adalah aturan yang digunakan untuk mengatur satu atau lebih badan publik secara langsung dengan melibatkan stakeholder non pejabat dalam mengambil keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif, serta memiliki tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program atau aset publik (Chris Ansel, 2008). *Collaborative governance* juga dimaknai sebagai proses kolektif dan egalitarian yang setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas substansi dalam mengambil keputusan dan setiap stakeholder juga memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut (Kumoro, 2013). Dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, Kerjasama kolaborasi akan terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antar pihak. Namun, masing-masing pihak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka harus tunduk atas kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011). Dalam tata Kelola pemerintahan ada tiga aktor yang memiliki pengaruh, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam *collaborative governance* pemerintah tidak menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah dan memerlukan aktor lain untuk menutupi keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah.

### ***Policy Implementation Theory***

Secara etimologis istilah kebijakan atau policy berasal dari Bahasa Yunani "*Polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam Bahasa latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam Bahasa Inggris "*police*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Budi Winarno (2008) menyebutkan secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, kelompok maupun lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

### ***Integrated Development Planning***

Perencanaan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan dengan pemerintah yang berperan utama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyaningsih, 2014).

### ***Tata Kelola Pemerintah (Good Governance)***

Secara **etimologis**, *Good Governance* berasal dari dua kata, yaitu *good* yang berarti baik, dan *governance* yang berarti tata kelola atau penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian, *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan kewenangan negara. Menurut *United Nations Development Programme*, *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan negara pada semua tingkat *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan efektivitas dalam setiap kebijakan publik. Pemerintahan yang baik harus mampu melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan (Riwukore, 2022).

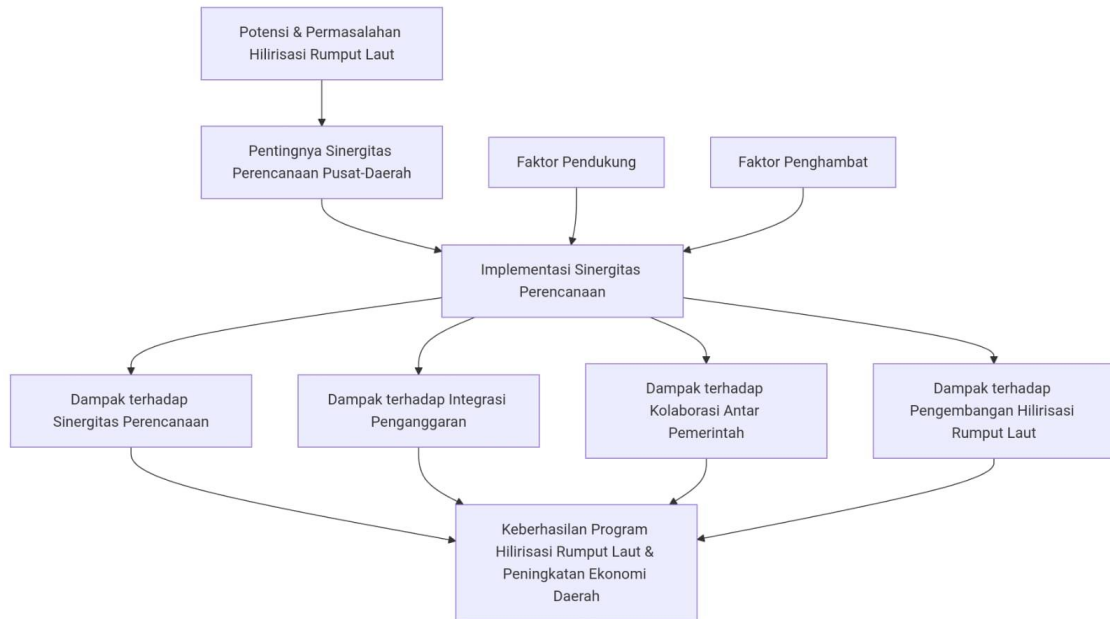
### ***Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah***

Pengembangan ekonomi lokal (*Local Economic Development*) didefinisikan sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah dengan bertumpu kepada kekuatan lokal yang terdiri dari kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun aset pengalaman (Haeruman, 2001). Suatu wilayah dapat berkembang lebih baik dengan berlandaskan upaya pengembangan ekonomi lokal membutuhkan suatu kebijakan yang mendorong inovasi dalam struktur industri yang terintegrasi (Supriyadi R, 2007).

### ***Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut***

Michael Porter (1985) dalam konsep *Value Chain* menyebut bahwa sebagian besar nilai ekonomi diciptakan di sisi hilir yaitu pada proses pasca-produksi seperti pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Hilirisasi tidak terbatas pada industri manufaktur, tetapi juga mencakup aspek distribusi, *branding*, pengemasan, pemasaran, bahkan sertifikasi produk. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi berbasis nilai tambah, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat posisi petani rumput laut sebagai produsen utama.

## Kerangka Berpikir



**Gambar 1.**  
Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam dampak sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan pandangan para pihak pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu untuk menentukan narasumber yang dianggap paling mengetahui sinergitas atau ketidaksinergisan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi NTT. Informan terdiri dari lima orang yaitu Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti memahami konteks social, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi pengembangan hilirisasi rumput laut secara lebih mendalam. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif bertujuan menangkap makna dan pengalaman partisipan secara langsung melalui interaksi yang intensif dalam konteks alami.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Produk hidrokoloid dari rumput laut dapat dikelompokkan menjadi karaginan, agar, dan alginat. Ketiga jenis hidrokoloid tersebut dihasilkan dari jenis rumput laut yang berbeda seperti *Kappaphycus alvarezii* dan *Eucheuma Cottoni* sebagai penghasil karagenan (karagino-fit), *Gracilaria spp* sebagai penghasil agar (agrofit) *Sargassum spp* sebagai penghasil alginat (alginofit). Potensi areal budidaya rumput laut di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar sangat luas dengan sentra utama adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Adanya perubahan pola rantai nilai dari yang sebelumnya hanya melibatkan pembudidaya dan pedagang menjadi melibatkan sektor industri pengolahan, sehingga memperkuat rantai nilai dari hulu hingga hilir serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

### Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Provinsi NTT telah memiliki enam unit pabrik pengolahan rumput laut yang tersebar di Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Raijua dengan tujuan mengolah rumput laut menjadi *carrageenan* dan *chips* kering untuk kebutuhan pasar. Kondisi ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menargetkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan termasuk rumput laut.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa secara konseptual telah terdapat keselarasan antara RPJMN Tahun 2020–2024 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018–2023, khususnya dalam pengembangan komoditas unggulan daerah berupa rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tercermin dari pengakuan bahwa tingkat optimalisasi sinergi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Pengembangan rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 masih didominasi pada tahap hulu (budidaya), sementara sektor hilirisasi belum berkembang secara maksimal akibat belum optimalnya keterpaduan lintas sektor, seperti antara sektor kelautan, perindustrian, dan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara dokumen perencanaan telah selaras, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan koordinasi dan fokus kebijakan.

Arah keberlanjutan pengembangan hilirisasi rumput laut ke masa depan, yaitu melalui penguatan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Merah Putih serta integrasi dalam konsep ekonomi biru yang direncanakan dalam periode pembangunan selanjutnya (2025–2029). Hal ini menandakan bahwa meskipun pada periode sebelumnya hilirisasi belum menjadi fokus utama, ke depan telah ada komitmen untuk menjadikannya sebagai prioritas strategis daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Sianggaputra (2025) yang berjudul strategi pengembangan model bisnis koperasi rumput laut dengan pendekatan cooperative dan mutual enterprise business model canvas yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi rumput laut mampu meningkatkan daya saing dan kapasitas adaptif petani dalam rantai nilai hilirisasi.

## **Dampak Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Lokasi dalam Mendukung Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi NTT**

Dampak sinergitas perencanaan pusat dan daerah terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, aktivitas, dan lokasi dapat dilihat dari adanya keselarasan antara RPJMN, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan RPJMD dan Renstra OPD daerah. Program pusat dan daerah tidak tumpang tindih, tetapi saling mendukung dalam pengembangan kawasan budidaya rumput laut. Hal ini selaras dengan pernyataan oleh Bapak Nixon M. Balukh, SP., M.Si sebagai kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, beliau mengatakan bahwa.

*“Sinergitas antara pusat dan daerah memiliki payung besar itu RPJMN dan RPJMD kemudian Renstra kemudian kita ada dukungan anggaran dari APBN ada DAU, DAK dan dana tugas pembantuan itu jelas disinkronkan dengan APBD. Sesuai kebutuhan daerah relatif karena nasional itu melihat 34 Provinsi mungkin daerah NTT membutuhkan sejumlah program kegiatan tetapi nasional, misalnya butuh 10 tetapi nasional baru bisa menjawab 6 saja karena tadi dia harus melihat seluruh Provinsi dengan prioritas tetapi prinsipnya berbasis potensi daerah itu mendapat perhatian dari pusat. untuk program dan kegiatan tidak tumpang tindih karena dalam pemetaan pembagian kewenangan itu sudah ada regulasi yang mengatur baik dari aspek perencanaan sampai dengan tata pelaksanaannya kemudian biasa itu ada forum perencanaan dengan tahapan-tahapannya yang mengatur itu sehingga dalam forum perencanaan itulah dibicarakan semua program kegiatan aksi setiap satu tahun itu agar tadi terjadi sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten” (wawancara pada tanggal 21 April 2026).*

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kelemahan yang memengaruhi dampak sinergitas yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan daerah dan alokasi pusat menyebabkan tidak semua program yang dibutuhkan daerah dapat terakomodasi secara optimal, masih terdapat tumpang tindih program antar perangkat daerah belum terbangunnya integrasi yang kuat antara sektor hulu dan hilir sehingga program yang dilaksanakan belum sepenuhnya membentuk rantai nilai yang utuh, adanya faktor politis dan teknis dalam pengalokasian anggaran pusat.

## **Dampak Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah terhadap Integrasi Penganggaran dalam Mendukung Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Dalam konteks hubungan pusat ke daerah, integrasi penganggaran mencakup sinkronisasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dikelola oleh kementerian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Pendanaan saling mendukung terhadap prioritas daerah. Hal ini selaras dengan wawancara terhadap Bapak Yoseph Hironimus Dahat, SE, M.Ec.Dev sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Kantor Bapperida Provinsi NTT, beliau menjelaskan bahwa :

*“Biasanya sinkronisasi sumber pendanaan kita bicarakan ada beberapa tahapan koordinasi mulai dari musberembang desa sampai dengan musrenbang nasional itu tahap-tahap koordinasinya maka terkoordinasi pendanaan saling mendukung terhadap prioritas daerah di tahap merencanakan sehingga tidak bisa kabupaten mengatakan prioritas kita tidak sama dengan pemerintah nasional kita memiliki satu koordinasi terkait dengan tema pembangunan yang sama karena sumber pendanaan ini idealnya memang dikoordinasikan untuk mendorong untuk satu fokus mencapai tujuan perencanaan nasional maupun kabupaten/kota provinsi.”(wawancara pada tanggal 7 April 2026).*

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun secara sistem telah terintegrasi dan konsisten, efektivitas penganggaran dalam mendukung hilirisasi rumput laut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh fokus anggaran yang masih dominan pada sektor hulu (budidaya), dukungan antar sektor dan antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal, dan terbatasnya intervensi pemerintah dalam pembiayaan sektor hilir yang masih banyak didorong oleh pihak swasta.

#### **Dampak Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah terhadap Koordinasi antar Lembaga dalam Mendukung Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Dampak sinergitas perencanaan pusat dan daerah terhadap koordinasi antar lembaga adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terhadap cara berbagai lembaga atau instansi bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelaraskan programnya. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Bapak Yoseph Hironimus Dahat, SE, M.Ec.Dev sebagai kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia pada Kantor Bapperida Provinsi NTT, beliau mengatakan bahwa :

*“Koordinasi pusat dan daerah merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakan apalagi jika berbicara tentang sinergitas jadi iya berdampak atau justru meningkatkan koordinasi pusat daerah justru menandakan terjadinya sinergitas kemudian dampaknya ketika sinergi itu ada program-program itu dilaksanakan dengan baik kemudian output-output yang direncanakan itu bisa dicapai harapannya dampaknya mungkin bisa dicapai”(Wawancara pada tanggal 7 April 2026).*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kecenderungan pelaksanaan program yang bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh lintas sektor. Selain itu, efektivitas koordinasi juga sangat dipengaruhi oleh prioritas nasional, sehingga tidak semua program daerah, termasuk hilirisasi rumput laut, mendapatkan perhatian yang sama pada setiap periode perencanaan

#### **Dampak Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah terhadap Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Dampak sinergitas perencanaan pusat dan daerah terhadap pengembangan hilirisasi rumput laut dilihat dari sejauh mana peningkatan produksi, perkembangan industri pengolahan, penggunaan teknologi, serta penyerapan tenaga kerja sebagai bagian dari proses hilirisasi

lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Hendra Y. Falukas, S.Kel., MM sebagai staff bidang budidaya pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, beliau mengatakan bahwa:

*“Sinergitas pemerintah pusat dan daerah contoh penganggaran bibit rumput laut jika banyak berarti normalnya harus banyak, tetapi terkait dengan produksi ada fenomena di lapangan yang tidak bisa diabaikan itu sangat berkaitan erat dengan produksi karena ada banyak indikator yang menentukan rumput laut seperti perawatan yang baik, tetapi ada musibah banjir itu selesai tetapi pada umumnya itu berbanding lurus. Kemudian tingkat pembudidaya masih dalam kelompok sederhana seperti dulu yang mereka hanya jemur di pasir sekarang sudah ada bale-bale ada para-para untuk jemur sampai di tingkat perusahaan perseroda itu teknologi pasca panen lumayan maju karena pabrik memiliki mesin khusus contoh mesin pengering dan mesin pencuci, jadi penggunaan teknologi itu telah berjalan dan berdampak sekali terhadap produktivitas di tingkat masyarakat dan perusahaan”* (Wawancara pada tanggal 13 April 2026).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa dukungan anggaran khususnya dalam penyediaan bibit secara umum berbanding lurus dengan peningkatan produksi, meskipun tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lapangan seperti kondisi alam dan teknik budidaya. Selain itu, penggunaan teknologi dalam budidaya dan pasca panen menunjukkan perkembangan, terutama pada tingkat industri yang telah menggunakan mesin modern, sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Namun, di tingkat pembudidaya, teknologi masih relatif sederhana sehingga perlu peningkatan kapasitas. Di sisi lain, nilai tambah produk dan penyerapan tenaga kerja masih belum optimal karena sebagian besar produksi masih dijual dalam bentuk mentah. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi belum berjalan maksimal, sehingga diperlukan kolaborasi antar sektor, khususnya antara Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk mendorong pengembangan industri pengolahan agar memberikan nilai tambah yang lebih besar serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Mendukung Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Michael Porter (1985) dalam konsep *Value Chain*, menyebut bahwa sebagian besar nilai ekonomi diciptakan di sisi hilir, yaitu pada proses pasca-produksi seperti pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Hilirisasi tidak terbatas pada industri manufaktur, tetapi juga mencakup aspek distribusi, *branding*, pengemasan, pemasaran, bahkan sertifikasi produk. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi berbasis nilai tambah, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat posisi petani rumput laut sebagai produsen utama.

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Nyoman Saniambara, SKM., M.Kes sebagai kepala bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPED) pada Kantor Bapperida Provinsi NTT, beliau mengatakan bahwa :

*“Yang paling mendukung itu sekarang menjadi komitmen pusat bahwa kompetensi kita termasuk rumput laut itu ada di RPJMD ada statement bahwa NTT itu proyeksi dan NTT punya garis pantai yang sangat luas, iklim juga cocok, tenaga kerja kita melimpah banyak orang yang tinggal di pesisir dan sebagainya*

*itu yang mendukung kemudian kita punya kesempatan karena belum terbawa industrialisasi sehingga misalnya bangun ini bisa mengeksalarasi semua yang menjadi penghambat adalah masih belum banyak investor yang masuk kemudian belum mengolah rumput laut secara skala besar investor belum ada biasanya mereka secara mentah kemudian kita bisa membuat hilirisasi ini karena petani rumput laut karena merasa keuntungan mereka terpacu untuk produksi rumput laut kemudian ada pabrik yang didirikan banyak tenaga kerja yang terserap. Saya kira ini akan jauh lebih menarik untuk orang berinvestasi di sektor yang terkait dengan rumput laut jadi sekarang jika masalahnya belum ada investasi sementara keterbatasan anggaran dari pihak provinsi untuk mendorong itu, pemerintah pusat juga banyak prioritas-prioritas nasional yang mereka kerjakan". (Wawancara pada tanggal 14 April 2026).*

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor pendukung sinergitas perencanaan pusat dan daerah terhadap pengembangan rumput laut di Provinsi NTT adalah adanya komitmen pemerintah pusat yang telah mencantumkan rumput laut sebagai prioritas dalam RPJMD, didukung oleh kondisi geografis NTT yang memiliki garis pantai sangat luas, iklim yang cocok, serta tenaga kerja melimpah dari masyarakat pesisir. Selain itu, NTT dinilai belum terindustrialisasi sehingga memberi peluang besar untuk akselerasi pembangunan rumput laut. Dari sisi regulasi, telah ada tahapan perencanaan yang jelas dari tingkat nasional hingga kabupaten, serta terdapat perangkat daerah dan tim penganggaran yang berkolaborasi untuk memastikan sinergitas perencanaan.

Sementara itu, faktor penghambat dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah minimnya investor yang masuk untuk mengolah rumput laut secara skala besar, sehingga selama ini rumput laut masih dijual dalam bentuk mentah. Keterbatasan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi kendala utama, karena target dalam RPJMD dan Renstra tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang tersedia, sehingga harus dilakukan prioritas kegiatan. Selain itu, proses perencanaan juga terkendala oleh variasi data dukung yang diminta serta waktu pelaksanaan yang sering melebihi standar yang ditetapkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan :

1. Sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum optimal masih terdapat keterbatasan integrasi lintas sektor, dominasi program pada sektor hulu, serta belum optimalnya keterlibatan perangkat daerah dalam mendukung hilirisasi rumput laut.
2. Sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya dampak positif seperti terwujudnya keselarasan arah kebijakan pembangunan, peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, penyelarasan program dan kegiatan lintas tingkat pemerintahan, mengurangi tumpang tindih dan duplikasi kegiatan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, peningkatan efektivitas alokasi anggaran, meningkatkan keterpaduan

perencanaan antar lembaga, mendorong keterkaitan yang kuat antara sektor hulu (budidaya) dan sektor hilir.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa faktor pendukung utama meliputi komitmen pemerintah terhadap pengembangan budidaya rumput laut, kesesuaian kondisi geografis wilayah pesisir, dukungan kebijakan, serta adanya kolaborasi antar perangkat daerah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya investasi pada sektor hilir, keterbatasan anggaran, belum optimalnya integrasi lintas sektor, serta permasalahan teknis seperti kualitas data dan keterlambatan pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sinergitas tidak hanya ditentukan oleh keselarasan dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kapasitas implementasi dan dukungan sumber daya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis dampak sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan integrasi lintas sektor melalui forum koordinasi yang lebih rutin dan terstruktur karena masih terdapatnya ego sektoral, tumpang tindih kegiatan, serta kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sehingga perencanaan tidak berjalan secara parsial;
2. Penguatan konsistensi antar dokumen perencanaan dan optimalisasi integrasi program dan kegiatan karena masih sering terjadi ketidaksesuaian antara arah kebijakan, kegiatan di berbagai dokumen perencanaan yang mengakibatkan duplikasi kegiatan, inefisiensi anggaran, serta tidak optimalnya pencapaian target pembangunan sehingga diperlukan keselarasan yang lebih kuat agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi geografis wilayah pesisir serta penguatan integrasi lintas sektor dan koordinasi antar lembaga;
4. Penguatan kolaborasi multipihak dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan pelaku usaha budidaya rumput laut.
5. Peneliti selanjutnya disarankan menjadikan periode 2025–2029 sebagai acuan untuk menilai keberlanjutan sinergitas perencanaan pusat dan daerah dalam pengembangan hilirisasi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengingat ke depan telah ada komitmen untuk menjadikannya sebagai prioritas strategis daerah

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alfiana, A., & Alwi, G. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Kesetaraan: Studi Kasus di Kota Makassar*.
- Agustina, N., Muchran, M., & Nasrullah. (2025). Pengaruh Keterbatasan Anggaran terhadap Efektivitas Program Pelatihan Tenaga Kerja : Studi Kasus Disnakertrans Sulawesi Selatan. *YUME : Journal of Management*, 8 (1).

- Amrin, Mahmud, M.K., & Nurfurkan, A. (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pembangunan Pembelajaran Pemerintahan*, 8(1), 42
- Ansel, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.10903/jopart/mum032>
- Azimatar, M.D., & Wijayanti, A. A. (2025). *Sinergitas Prinsip Good Governance dan Kekuatan Negara: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Publik Indonesia*.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Buku I – Agenda Pembangunan Nasional*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
- Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023*. Kupang: Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2023*. Kupang: BPS NTT.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). *Planning local economic development: Theory and practice* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. [https://books.google.co.id/books?id=OSC3\\_LYHHI8C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_vpt\\_read#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=OSC3_LYHHI8C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false)
- Bengen, D.G (2013). *Sinopsis ekosistem dan Sumber Daya Pesisir dan Laut*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/24548>
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengemablikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. Boston: McGraw-Hill.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). *The state of world fisheries and aquaculture 2022: Towards blue transformation*. FAO.
- Ferdinan, L., dkk. (2025). *Studi Nilai Tambah Rumput Laut (Kappaphycus sp) menjadi Alkali Treated Cottoni (ATC)*. Kupang : Universitas Nusa Cendana.
- Frederickson, H.G., & Smith, K.B. (2003). *The Public administration theory primer*. Westview Press.
- Haeruman, H. (2001). *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hidayat, N., Kaaffah, N. F., Situmorang, M. J. A., Subekti, E. A., & Radianto, D. O. (2024). Perkembangan bisnis rumput laut di Indonesia: Tinjauan literatur tentang tren dan tantangan (2019–2024). *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(2). <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.103>
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Michael Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. New York: Free Press.

- Nafiz, Rizka Yakutun, dkk. (2025). *Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah: Studi Implementasi di BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 4.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Kupang : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2022). *Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 Nomor 106*. Kupang : Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiro, B. (2014). *Responsivitas Anggaran : Peran Partisipasi Publik, transparansi, dan komitmen Perumus Kebijakan Anggaran (Studi Penyusunan Program dan Alokasi Anggaran APBD Sektor Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2013)*. Universitas Gadjah Mada.
- Winarno,B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.